

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi seringkali menjadi fokus utama pembangunan nasional di negara berkembang. Menurut Todaro dalam Suryana (2000) pembangunan didefinisikan sebagai proses multidimensi yang melibatkan perubahan besar dalam struktur sosial, sikap mental dan institusi nasional, termasuk percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan dan penghapusan kemiskinan absolut. Pembangunan ekonomi dapat berdampak negatif karena pembangunan yang tidak merata antar daerah.

Secara umum, tujuan utama setiap negara di dunia adalah meningkatkan taraf hidup atau membuat kesejahteraan seluruh rakyatnya dengan upaya meningkatkan sebuah pembangunan ekonomi suatu negara. Jika suatu negara ingin meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyatnya, ia harus mengembangkan potensi ekonominya. Dengan kata lain, pembangunan ekonomi merupakan upaya sadar dan langsung yang dilakukan suatu negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dengan menggunakan sumber daya yang ada. Menurut Sukirno (2016) Peningkatan kesejahteraan antara lain dapat diukur dengan meningkatnya pendapatan nasional atau tingginya laju pertumbuhan ekonomi tahunan.

Dalam Islam, konsep pembangunan ekonomi ini mendapat perhatian khusus, konsep kesejahteraan dalam Islam sangat diutamakan dalam kehidupan sosial, seperti konsep zakat, shadaqoh, adalah contoh dari bagaimana agama

Islam sangat memposisikan konsepsi kesejahteraan umatnya. Bahkan Al-Qur'an itu sendiri sangat mementingkan terhadap kemaslahatan umat, yang berorientasi kepada kesejahteraan umat itu sendiri, yang hanya bisa ditentukan dengan bekerja keras dan menghilangkan kemalasan (malas), seperti yang ditegaskan dan tertuang dalam surat Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (القصص : ٧٧)

Artinya: *“Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuatbaiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan”*.

Hakikat manusia dalam Islam adalah sebagai objek fokus dalam menata sebuah pembangunan dalam sebuah peradaban, pemikiran yang terkemuka dan di akui oleh dunia dalam wacana paradigma pembangunan Islam berasal dari tokoh terkemuka yakni Ibn Khaldun. Islam laksana Sang Pencerah yang membawa umat manusia kepada jalan kebaikan serta menjadi lentera bagi umat dalam menjalani kehidupan dunia maupun akhirat, yang tidak membedakan manusia dari warna kulit, ras dan golongan, akan tetapi tetap dalam pandangan Islam semua manusia bersifat egaliter, dan yang menjadi acuan apakah dia menjadi manusia yang baik di mata Tuhan adalah dia yang senantiasa beribadah dengan ikhlas, menjalin hubungan yang baik bagi sesamanya ataupun menjaga ketertiban hubungan dengan lingkungannya khususnya dengan

alam sekitarnya. Dikarenakan Islam yang bersifat menyeluruh, maka ibadahnya pun bersifat menyeluruh. Didasari hal tersebutlah agar proses pembangunan dapat dilihat sebagai ibadah, pembangunan tersebut haruslah didasari dari petunjuk yang sudah Allah wahyukan kepada umatnya lewat Nabi Muhammad SAW dalam Al Qur'an. Hal tersebut menunjukkan bahwa konsep pembangunan spiritual beserta konsep pembangunan materil tidak bisa di pisahkan, semua itu harus menjadi sebuah kesatuan dan harus di bangun secara bersamaan.

Berdasarkan ayat diatas dapat diketahui bahwa manusia senantiasa dituntut untuk memanfaatkan apa yang telah Allah anugerahkan di bumi ini, dengan cara tidak merusak sumber daya alam yang tersedia dalam memanfaatkanya termasuk ketersediaan sumber daya alam yang melimpah guna di manfaatkan demi kemaslahatan umat yang nantinya bisa mensejahterakan masyarakat yang ada.

Dalam perspektif Islam, sebuah pembangunan harus didasari atas lima pondasi filosofis yaitu tauhid uluhiyyah, tauhid rububiyah, al falah, khilafah, dan tazkiyyah. Pondasi filosofis tersebut adalah prinsip-prinsip yang harus melekat dalam Islam dan berasal dari sumber utama dalam Islam, yakni Al Qur'an dan Sunnah.

Tujuan dari pembangunan ekonomi di setiap daerah adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan penduduk yang tinggi. Namun demikian, perencanaan pembangunan seringkali dihadapkan dengan sumber daya yang terbatas baik itu dari sisi anggaran yang dimiliki oleh pemerintah, tabungan domestik, maupun kepemilikan sumber daya lain

diantaranya : lahan pertanian, sistem irigasi, bahan galian, dan ketersediaan tenaga kerja terampil. Oleh karena itu, dana yang terbatas harusnya diinvestasikan secara bijak guna mencapai laju pertumbuhan dan tingkat kesejahteraan yang relatif tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini diperlukan untuk mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Realisasi pembangunan ekonomi pada akhirnya di tujukan untuk kesejahteraan masyarakat. Bukan hanya sekedar pembangunan dalam hal fisik seperti insfrastruktur, melainkan cakupan pembangunan yang lebih luas. Menurut Todaro (2000) Hakikat pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses multidimensional yang membawa perubahan-perubahan signifikan, baik pada sektor ekonomi, perubahan sistem sosial masyarakat, penurunan atau penghapusan kemiskinan, ketimpangan, dan pengangguran dalam konteks sudut pandang pertumbuhan ekonomi. Kiat menilai keberhasilan sebuah pembangunan, variabel yang harus diperhatikan adalah tingkat kesejahteraan, yakni tersedianya sarana yang mendukung dalam aktifitas masyarakat, serta terhindarnya dari jurang kemiskinan.

Menurut Sarifah, Atmaja, Verawati, (2019) Ketika suatu daerah hanya dapat memprioritaskan pembangunan yang terkonsentrasi, dan pertumbuhan yang tidak merata serta pembangunan kehidupan sosial, politik dan ekonomi yang tidak seimbang akan mengarah pada pembangunan yang rapuh. Oleh karena itu, pembangunan harus menyertakan peran masyarakat sebagai pemain utama dan pihak-pihak yang akan merasakan pembangunan. Tujuan utama pembangunan ekonomi adalah meningkatkan kuantitas barang dan jasa serta

kesempatan kerja di masyarakat. Potensi lapangan kerja sangat besar, dan kontribusi UKM terhadap pembentukan produk domestik bruto (PDB) sangat signifikan. Alasan lainnya adalah usaha mikro dan kecil memiliki keunggulan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan padat karya, terutama di bidang pertanian tanaman real estate, peternakan, perikanan, perdagangan dan restoran / restoran.

Ekonomi kerakyatan belakangan ini menjadi istilah baru dan ramai diperbincangkan di berbagai forum dan di banyak partai politik. Ekonomi kerakyatan seakan menjadi trend leader baru dalam wacana pembangunan, bukan tanpa alasan. “Keruntuhan” yang selama lebih dari 30 tahun dibanggakan perekonomian Indonesia telah memaksa semua pihak untuk mengkaji ulang struktur perekonomian Indonesia. Menurut Kriyantono (2008) Dilihat dari situasi sosial masyarakat Indonesia saat ini, dapat diasumsikan bahwa koperasi dapat tumbuh, berkembang, dan pada saat yang sama juga dapat berperan dan berkembang dari masyarakat adat yang memiliki hubungan sosiologis yang baik menjadi masyarakat yang menguntungkan, yaitu masyarakat melalui hubungan emosional utama. Perkembangan masyarakat yang lebih bersahabat. Heterogen.

Setiap program pembangunan, disusun pula dalam anggaran regional, baik itu Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Melihat pada realitas perekonomian yang multidimensi ini, fokus pemerintah akan lebih bervariasi dan tidak hanya terpusat pada program pembangunan Nasional saja. Pembangunan ekonomi regional yang melonjak tinggi akan mempunyai dampak timbal balik dengan

kondisi ekonomi secara Nasional. Perkotaan besar yang berperan sebagai sentralisasi perekonomian haruslah mendapatkan prioritas dan fokus utama pemerintah pada saat ini, tanpa mengesampingkan pembangunan pada daerah pedesaan serta daerah yang katagorinya masih tertinggal.

Menurut Junaidi (2011) dalam penggerak pembangunan ekonomi daerah, salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah kemampuan untuk memanfaatkan atau menggunakan baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam seefektif mungkin. Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan daerah sangat erat kaitannya dengan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Melaksanakan rencana pembangunan daerah berdasarkan penetapan kawasan yang direncanakan dan karakteristik daerah. Menurut Yulianita (2010) Karakteristik kawasan yang direncanakan meliputi berbagai permasalahan dan potensi yang ada di kawasan tersebut. Rencana pembangunan daerah bertujuan untuk mengelola sumber daya daerah guna mendukung pembangunan ekonomi daerah.

Perkembangan produk nasional bruto (GNP) potensial mencerminkan pertumbuhan dan pertumbuhan output per kapita. Dalam jangka panjang, taraf hidup masyarakat di wilayah tersebut lambat laun dipengaruhi oleh tabungan (investasi) dan pertumbuhan penduduk. Menurut Asiyan (2014) Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, perlu diketahui faktor-faktor apa saja yang akan mempengaruhi pertumbuhan daerah. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan daerah adalah investasi.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, memberitahukan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah mempunyai kewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sebuah sistem perencanaan Pembangunan Nasional. Paduan perencanaan pembangunan daerah tersebut mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJMD) dalam jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Menurut Raina, Juniadi, Yulmardi (2015) Keberhasilan pembangunan sektor ekonomi suatu daerah tidak cukup hanya dilihat dari perspektif perkembangan ekonomi saja, akan tetapi perlu adanya indikasi indikator lain yang dapat mencerminkan ketiga komponen pembangunan daerah secara menyeluruh yaitu, Pembangunan Ekonomi, Sumber Daya Manusia, dan Infrastruktur. Semua itu perlu adanya, karena ketinggian capaian pembangunan ekonomi seringkali tidak di ikuti dengan capaian pembangunan SDM dan infrastruktur yang tinggi pula.

Kabupaten Sleman sebagai salah satu daerah besar dan pusat perekonomian di Daerah Istimewa Yogyakarta juga mempunyai beberapa masalah dalam bidang pembangunan yang cukup krusial. Pada RPJMD untuk tahun 2016-2021, mengutip hasil dari evaluasi yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya disebutkan bahwa Kabupaten Sleman telah mengalami

sebuah perbaikan dalam hal kesejahteraan rakyat serta kemajuan daerah. Namun ditengah era globalisasi saat ini, dimana setiap daerah dituntut untuk lebih progresif, supaya program pembangunan dapat ditunjukkan untuk peningkatan dan penyerapan daya tarik dan daya saing.

Terkait yang termaktub dalam amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, maka dalam laporan RKPD Kabupaten Sleman, disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021. Problematika yang sering ditemukan dalam kegiatan pembangunan daerah adalah kegiatan yang direncanakan oleh pemerintah tidak mempunyai dampak yang secara langsung pada kesejahteraan masyarakat. Kenaikan PDRB pada hakikatnya tidaklah menafsirkan keadaan masyarakat secara riil. Pada realitasnya, kemiskinan yang ada di Kabupaten Sleman belum bisa diatasi secara maksimal. Total lapangan kerja yang masih belum memadai sehingga berimbas kepada tingkat pengangguran yang masih cukup tinggi, serta masalah tata kelola Kabupaten, yang berdampak pada masalah sosial dan lingkungan.

Jumlah pertumbuhan penduduk Kabupaten Sleman masih termasuk tinggi meskipun sudah melalui proses penurunan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Tidak seimbang rasio antara jumlah penduduk dan luas daerah yaitu 1,2 juta jiwa dengan luas wilayah sebesar 574,82 km². Masih ditemukan juga sebuah ketimpangan regional di Kabupaten Sleman, baik dalam pembangunan antar kecamatan maupun siklus perekonomian secara keseluruhan. Berangkat dari hal tersebut, maka diperlukanlah sebuah program

pembangunan yang progresif serta diproyeksikan dengan masalah yang tengah dihadapi oleh Kabupaten Sleman. Dalam menyikapi percepatan pembangunan tersebut, Pemerintah Kabupaten Sleman telah merumuskan berbagai program pembangunan daerah, yang mencakup ranah sosial maupun ekonomi, dengan misi “Terwujudnya Masyarakat Sleman Yang Lebih Sejahtera, Mandiri, Berbudaya Dann Terintegrasikanya Sistem *E-Government* Menuju *Smart Regency* Pada Tahun 2021”.

Menurut Yulianita (2010) Keberhasilan penyelenggaraan pembangunan daerah sangat erat kaitannya dengan kualitas pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Melaksanakan rencana pembangunan ekonomi daerah berdasarkan penetapan kawasan yang direncanakan dan karakteristik daerah. Karakteristik kawasan yang direncanakan meliputi berbagai permasalahan dan potensi yang ada di kawasan tersebut. Rencana pembangunan daerah bertujuan untuk mengelola sumber daya daerah guna mendukung pembangunan ekonomi daerah.

Masing-masing ranah tersebut akan diperbaiki seiring berjalanya waktu dengan menetapkan sasaran yang akan mempunyai target pada lima tahun berikutnya. Terkait keadaan tersebut, perlu adanya penyusunan evaluasi terhadap hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan serta analisis supaya menjadi acuan dan landasan untuk penyusunan perencanaan pembangunan pada periode berikutnya. Sehingga penulis tertarik dalam menulis skripsi dengan judul “Analisis Evaluasi Pembangunan Sektor Ekonomi di Kabupaten Sleman”.

B. Batasan Masalah

Agar permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini tidak melebar dan supaya lebih rinci, maka dibutuhkan pembatasan masalah agar mempermudah dalam mendapatkan informasi yang diperlukan. Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Variabel yang digunakan yaitu : PDRB kabupaten Sleman sebagai variabel Dependen (Y), sedangkan industri (X1), koperasi (X2), perdagangan (X3), investasi (X4), UMKM (X5).
2. Dalam penelitian ini dimulai dari tahun 2011-2020. Pada tahun 2020 digunakan sebagai tahun akhir dari periode penelitian ini.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut maka yang menjadi permasalahan utama yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh jumlah industri terhadap PDRB di Kabupaten Sleman?
2. Bagaimanakah pengaruh jumlah koperasi terhadap PDRB di Kabupaten Sleman?
3. Bagaimanakah pengaruh jumlah perdagangan terhadap PDRB di Kabupaten Sleman?
4. Bagaimanakah pengaruh jumlah investasi terhadap PDRB di Kabupaten Sleman?
5. Bagaimanakah pengaruh jumlah UMKM terhadap PDRB di Kabupaten Sleman?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah industri terhadap PDRB di Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui pengaruh jumlah koperasi terhadap PDRB di Kabupaten Sleman.
3. Untuk mengetahui pengaruh jumlah perdagangan terhadap PDRB di Kabupaten Sleman.
4. Untuk mengetahui pengaruh jumlah investasi terhadap PDRB di Kabupaten Sleman.
5. Untuk mengetahui pengaruh jumlah UMKM terhadap PDRB di Kabupaten Sleman.

E. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut :

1. Bagi peneliti. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan tambahan informasi untuk melakukan penelitian terkait.
2. Sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah ataupun instansi terkait dalam menetapkan rancangan pembangunan di masa depan.
3. Sebagai tambahan ajaran bagi pembaca terutama mahasiswa Ekonomi dalam hal evaluasi pembangunan ekonomi.

4. Menjadi sebuah perbandingan bagi penelitian dengan topik yang sama di masa yang akan datang.

